

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh. 2007. *Teori Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta
- Afrizal.2018. *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Indomedia Pustaka: Sidoarjo
- Ahmad Zazali. 2019. *Kebijakan dan Keutamaan Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. IMN; Jakarta
- Amiruddin & Zainal Asikin.2008.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Asih Retno Dewi. 2017. *Persoalan Agraria Kontemporer:Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah dan Konflik*. Jakarta: STPN Press
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2018. *Statistik Indonesia Tahun 2018*.BPS:Jakarta
- Bambang Sunggono.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Bernahard Limbong. 2014. *Politik Hukum Pertanahan*. Margaretha Pustaka: Jakarta.
- Chainur Arrasjid. 2006.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Sinar Grafika:Jakarta
- Conflik Resolution Unit. 2018. *Panduan Pelatihan Pra Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam*. AZ.Jakarta
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis.2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers:Jakarta
- F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta
- Forest Watch Indonesia.2017.*Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*. FWI:Bogor.

Gatot Soemartono.2006.Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.  
Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Gunawan Wiradi. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*.  
Jakarta: KPA

H.P Panggabean.2020. *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia

I Made Suwitra. 2014. *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 10 Desember 2014*

Kuat Puji Prayitno. 2012.*Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Gentang Publising:Yogyakarta

Kurnia Warman. 2010.*Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*. HuMa: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung

Moh Shohibuddin.2018.Perspektif Agraria Kritis. STPN Press: Jogjakarta

Muhammad Syukri Albani Nasution dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana: Jakarta,

Nur Basuki Winamno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.

Otje Salman, 2004. *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama: Jakarta

Peter Mahmud Marzuki.2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group: Jakarta

-----, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana :Jakarta

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Radja Grafindo Persada: Jakarta

Rusmadi Murad. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Alumni: Bandung

Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):Jakarta

Sjachran Basah.2016. *Eskistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni: Bandung

Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni: Bandung

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ,PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta

Suwarni dan Nunung Nurhidayah. 2018. *Membangun Trust Melalui Akuntabilitas Kinerja*. Intelegensia Media: Malang

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta

Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi: Padang

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan  
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan  
Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan  
Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan  
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **3. Jurnal, Buletin dan Konvensi**

Buletin Suara Pembaruan Agraria. 2014. 20 Tahun KPA mengawal Agenda Reforma Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria. Jakarta

Denico Doly. Buletin Info Singkat Hukum. Vol.VI, No.01/i/P3DI/Januari/2014.Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI

Damang Averroes Al-Khwarizmi. Artikel Negara Hukum. Published November 22, 2012

Mulyono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia melalui Rebitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum

Istijab. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol 1.

#### 4. Wawancara

Wawancara dengan Olsia Rediftera, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tanggal 1 Desember 2020.

Wawancara dengan Faldo Andrea, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tanggal 4 Desember 2020

#### 5. Website

Eva Achjani Zulfa. <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia/.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

[http://pnkepanjeng.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=156\(bag1\)](http://pnkepanjeng.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156(bag1))

Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online/daring dalam jaringan/  
<https://kbbi.web.id/sengketa>.

Website Pengadilan Negeri Kabanjahe. Prosedur Mediasi

#### 6. Koran

Maria SW Sumardjono. Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. Koran Kompas Edisi Selasa 23 Februari 2021

Media Indonesia. Selesaikan Sengketa Tanah dengan Cepat. Wartawan Ghani Nurcahyadi. Rubrik Ekonomi, Edisi 4 Desember 2018

#### 7. Kamus dan Bahan

Deperteman Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1999.

Paparan Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Rakernas ATR/BPN Tahun 2020

Bahan Paparan Irjen Pol Hary Sudwijanto, Staf Khusus Menteri ATR/BPN  
Bidang Penanganan Sengketa, Konflik Tanah dan Ruang. Pada Rakernas  
Kementerian ATR/BPN 6 April 2021

